

TELAAH KEBIJAKAN PROGRAM ATENSI ANAK YATIM PIATU DI KOTA KUPANG: ANTARA BANTUAN FORMAL DAN REALITAS PENGASUHAN YANG TERFRAGMENTASI

Paula Indriyati Suwarta¹, Cresentia Maria Videlia Neno², Opa Ra'o Bureni³, Nurnita Mbau⁴,
Ongky Mahendra Garra⁵, Robinson Doke Nawa⁶, Lasarus Jehamat⁷, Christine E. Meka⁸, Lalu
Didik Apriawan⁹

123456789 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available Januari, 2026

indrisuwarta@gmail.com,

elsaneno31@gmail.com,

Opabureni26@gmail.com,

nurnitambau4@gmail.com,

ongkigarra06@gmail.com,

rdokenawa@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

ABSTRAK

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dirancang sebagai upaya negara dalam melindungi dan memenuhi hak anak yatim piatu. Artikel ini menganalisis pelaksanaan Program ATENSI bagi anak yatim piatu di Kota Kupang dengan menyoroti kesenjangan antara bantuan formal pemerintah dan realitas pengasuhan yang terfragmentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aparaturnya Dinas Sosial, keluarga pengasuh penerima manfaat, serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ATENSI, terutama bantuan tunai sebesar Rp750.000 per tahun, belum mampu memenuhi kebutuhan anak secara komprehensif akibat rendahnya intensitas program, lemahnya sosialisasi komponen bantuan non-tunai, serta fragmentasi kewenangan antar lembaga pemerintah. Fragmentasi juga terjadi pada tingkat keluarga pengasuh yang memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi dan emosional. Berdasarkan analisis teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola dalam sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga dan pendampingan keluarga agar perlindungan anak yatim piatu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Program ATENSI; Anak Yatim Piatu; Perlindungan Anak; Pengasuhan Terfragmentasi

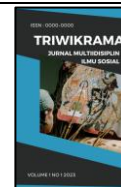
ABSTRACT

The Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Program is designed as a state initiative to protect and fulfill the rights of orphans. This article examines the implementation of the ATENSI Program for orphans in Kupang City, focusing on the gap between formal government assistance and the fragmented reality of caregiving practices. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and observations involving Social Affairs Office officials, beneficiary caregivers, and related stakeholders. The findings indicate that ATENSI assistance, particularly annual cash transfers of IDR 750,000, has not adequately met children's comprehensive needs due to low program intensity, limited dissemination of non-cash assistance components, and fragmented institutional authority across governmental levels. Fragmentation is also evident at the household level, where caregivers face economic and emotional constraints. Drawing on Talcott Parsons' structural functionalism theory, this condition reflects suboptimal functioning of Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency within the child protection system. Strengthening inter-institutional coordination and caregiver support is therefore essential to ensure more effective and sustainable protection for orphans.

Keywords: ATENSI Program; Orphans; Child Protection; Fragmented Caregiving

*Corresponding author

E-mail addresses: indrisuwarta@gmail.com

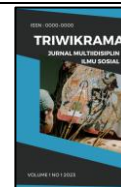


1. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak yatim piatu diartikan sebagai anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya karena meninggal dunia. Sejalan dengan itu, Nur (2014) menjelaskan bahwa anak yatim merupakan anak yang mengalami kehampaan dalam kebersamaan, karena kehilangan sosok ayah dan ibu yang sangat mereka cintai, sehingga menumbuhkan perasaan yang lembut akibat hilangnya kasih sayang tersebut. Setelah kematian orang tua, anak memerlukan sosok pengganti sebagai figur orang tua, yang dapat berasal dari keluarga dekat. Apabila figur pengganti ini dapat berfungsi dengan baik, maka anak dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab sosial dan kemandirian emosional. Namun, jika figur tersebut tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat memicu timbulnya perilaku sosial yang menyimpang dan gangguan moral (Nurhidayati & Chairani, 2014; dikutip dalam Haura Dkk, 2021).

Ketidakhadiran ayah atau ibu membuat anak yatim piatu mengalami kesedihan mendalam, meski mendapat simpati dan perhatian dari orang sekitar. Rasa cemas dan gelisah muncul, yang dapat menimbulkan frustrasi jika tidak terkendali. Anak kemudian bereaksi dengan tiga cara: melawan, menghindar, atau diam. Reaksi terhadap frustrasi ini dapat memunculkan perilaku bermasalah hingga kenakalan remaja, terutama bila anak berasal dari keluarga besar dengan disiplin lemah. Menurut Cyril Burt, kondisi disiplin yang tidak teratur serta pola asuh yang berubah-ubah sering memicu perilaku menyimpang pada anak yatim. Tidak jarang ditemukan, anak yatim yang kondisinya labil mudah dipengaruhi teman-temannya yang nakal, baik teman sekolah maupun teman bermain. Praktik berbohong, bertengkar, mencuri dan tidak kriminal lainnya, yang lambat laun menjadi patologi sosial yang meresahkan masyarakat. Bagi keluarga, mereka adalah wujud anak sebagai cobaan atau fitnah. Karena tingkahnya yang nakal (delinquent), liar dan binal (tidak berbudi), yang merupakan ironi dan kejadian yang menyedihkan yang tiada taranya, tidak jarang mereka akan menurunkan reputasi keluarga (Masyhari, 2017). Oleh karena itu anak yatim membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari negara, di Indonesia perlindungan bagi anak yatim diwujudkan melalui sejumlah kebijakan dan program, salah satunya Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dirancang oleh Kementerian Sosial sebagai bentuk intervensi sosial untuk memenuhi kebutuhan anak-anak rentan, khususnya anak yatim piatu.

Program ATENSI adalah program pelayanan sosial yang bertujuan untuk membantu dan mendukung individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial atau kecanduan. Melalui program ini, penerima manfaat diberikan berbagai jenis dukungan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan sosial lainnya. Program ATENSI bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kualitas hidup penerima manfaat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Pelaksanaan program ATENSI dilakukan oleh berbagai satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Zaidan dan Resnawaty, 2022). Untuk anak yatim program ATENSI dirumuskan untuk memberikan dukungan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan pola pengasuhan dalam keluarga. Akan tetapi, dalam implementasinya, termasuk di Kota Kupang, program ini masih dihadapkan pada persoalan pengasuhan anak yatim yang cenderung terpecah-pecah antara peran keluarga, lembaga sosial, dan pemerintah. Situasi tersebut menimbulkan jarak antara tujuan kebijakan yang ideal dengan realitas pengasuhan di lapangan. Atas dasar itu, artikel ini berfokus pada kajian pelaksanaan Program ATENSI di Kota Kupang dengan menekankan kesenjangan antara bantuan formal pemerintah dan praktik pengasuhan nyata, guna menilai



efektivitas kebijakan sekaligus membuka peluang perbaikan perlindungan sosial bagi anak yatim di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan (Siagian, 2011:52). Menurut Soegianto dalam Harahap (2020), penelitian kualitatif berupaya menjelaskan suatu fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang rinci dan berfokus pada makna di balik peristiwa yang diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yakni dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu agar informan benar-benar memahami kebijakan dan pelaksanaan program yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Kupang, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan ATENSI. Selain itu, informan tambahan meliputi keluarga pengasuh anak yatim piatu penerima manfaat program, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai realitas pengasuhan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk bantuan, mekanisme pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam program ATENSI, sementara observasi digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan validitas terhadap data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Program ATENSI Untuk Anak Yatim Piatu di Kota Kupang

Pelaksanaan bantuan ATENSI bagi anak yatim piatu di Kota Kupang merefleksikan upaya pemerintah daerah untuk menyediakan perlindungan sosial minimal bagi kelompok anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dan hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Berdasarkan penjelasan pegawai Dinas Sosial, Ibu Marjini, bantuan ATENSI diberikan kepada anak yatim piatu yang diverifikasi oleh pekerja sosial melalui asesmen sosial, dengan prioritas pada keluarga miskin dalam desil 1-5. Skema bantuan meliputi tiga komponen utama:

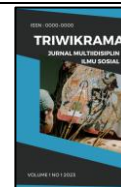
1. Dana asistensi tunai sebesar Rp 750.000 per anak per tahun,
2. Paket permakanan yang berisi kebutuhan pangan pokok,
3. Serta kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks anak yatim piatu, komponen-komponen ini dirancang untuk memenuhi dimensi sosial-ekonomi (melalui dana uang tunai), dimensi gizi (melalui bantuan permakanan atau sembako), serta dimensi perkembangan karakter dan kapasitas anak (melalui bimbingan dan pelatihan). Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa manfaat yang diterima anak yatim piatu lebih terpusat pada bantuan uang tunai, sementara komponen lainnya belum diakses secara merata oleh keluarga pengasuh. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa Informan yaitu orang tua dan orang tua asuh dari anak yatim piatu. Seperti informasi yang disampaikan oleh ibu berinisial IL orang tua asuh yang sekaligus Nenek dari salah satu anak yatim piatu, yang menuturkan:

“Dari bantuan atensi yang cucu saya dapat baru yang uang tunai ini”

Informasi serupa juga disampaikan oleh seorang ibu berinisial GG ibu dari seorang anak yatim, ibu GG menuturkan bahwa:

“Bantuan atensi yang anak saya dapat ini baru pertama kali ini juga uang tunai Rp 750.000, untuk bantuan lain dari ini program saya belum tau ada atau tidak, tapi yang pasti anak saya baru dapat yang uang tunai saja”



Informasi serupa juga di sampaikan oleh informan lain yaitu ibu berinsial EN yaitu seorang ibu dari anak yatim:

“Untuk bantuan atensi ini anak saya baru dapat yang uang tunai saja”

Dana asistensi tunai yang hanya diberikan satu kali dalam setahun menunjukkan bahwa ATENSI berfungsi sebagai subsidi stimulan, bukan program perlindungan sosial berkelanjutan. Nilai bantuan sebesar Rp 750.000, meskipun bermanfaat untuk kebutuhan mendesak, tidak cukup untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup harian anak yatim piatu dalam jangka panjang. Dari perspektif kebijakan, hal ini memperlihatkan keterbatasan intensitas program dalam menjawab kompleksitas beban pengasuhan yang ditanggung oleh keluarga pengganti, terutama keluarga yang miskin. Banyak keluarga pengasuh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sekolah atau pembelian makanan, tetapi karena sifatnya tidak berkelanjutan, manfaat bantuan sering kali bersifat sesaat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperkuat siklus kerentanan, di mana pemenuhan kebutuhan anak tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga pengasuh, bukan pada sistem bantuan sosial yang konsisten.

Masalah lain yang muncul adalah terbatasnya akses informasi penerima terhadap komponen ATENSI yang lain. Wawancara dengan beberapa pengasuh menunjukkan bahwa sebagian besar hanya mengetahui keberadaan dana tunai, sementara komponen seperti permakanan dan bimbingan belum disosialisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa orang tua asuh, seperti yang di jelaskan oleh ibu dengan insial EN yang anaknya termasuk anak yatim, beliau menuturkan:

“Untuk bantuan atensi ini anak saya baru dapat yang uang tunai saja dan kami juga belum tau apa-apa saja bantuan yang diberikan, karena memang belum ada informasi mengenai bantuan apa saja yang nantinya akan diterima kedepannya.”

Hal serupa juga di sampaikan oleh ibu yang berinsial IL orang tua asuh yang juga nenek dari salah satu anak, menuturkan:

“Saya juga belum pernah dengar dari petugas terkait bantuan lain yang akan di dapat seperti sembako atau sosialisasi belum pernah dapat”

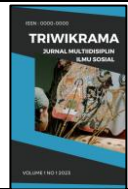
Informasi yang serupa juga di sampaikan oleh ibu yang berinisial E yaitu seorang ibu dari salah satu anak yatim, ibu E menuturkan:

“Saya juga belum dapat info mengenai bantaun atensi ini dapat apa-apa saja”

Kondisi ini mengindikasikan adanya information gap yang membuat skema bantuan tidak terserap secara optimal oleh anak yatim piatu yang membutuhkan. Kesenjangan informasi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi pelaksana lebih menekankan aspek administratif berupa penyaluran dana melalui Bank NTT ketimbang aspek pelayanan sosial berupa penyampaian informasi, pendampingan, dan penguatan aset keluarga pengasuh. Padahal, dalam konteks pengasuhan anak yatim piatu, kebutuhan akan pendampingan emosional, bimbingan, dan pembentukan kapasitas jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar pemberian dana tunai.

Fragmentasi Layanan dan Pengasuhan dalam Implementasi Program ATENSI Anak Yatim Piatu di Kota Kupang

Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Kupang serta para orang tua dan keluarga pengasuh menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak yatim piatu di Kota Kupang berlangsung dalam konteks layanan yang terfragmentasi, baik pada level kelembagaan maupun pada level keluarga pengasuh. Fragmentasi ini terutama tampak pada perbedaan kewenangan antar-instansi yang menangani anak yatim serta kapasitas keluarga pengasuh yang beragam. Pada tingkat kelembagaan, pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi NTT menjadi salah satu faktor yang menyebabkan layanan tidak berjalan seragam. Anak yatim



yang tinggal di panti asuhan berada di bawah otoritas Dinas Sosial Provinsi, sedangkan anak yang diasuh dalam keluarga berada dalam kewenangan Dinas Sosial Kota Kupang. Struktur kewenangan ini dijelaskan oleh Ibu Marjini selaku pegawai Dinsos Kota Kupang yang menuturkan bahwa:

“Kalau untuk kota kupang sendiri seperti yang saya bilang tadi anak di dalam panti itu tidak dilayani oleh Pemerintah kota kupang karena itu dia di bawah kewenangan dinas sosial provinsi, jadi dinas sosial kota ini cuman menangani anak di luar panti. Jadi anak-anak di dalam panti itu tidak menerima bantuan dari kami, anak-anak yang diluar panti saja dana anak yang ada dalam pengasuhan keluarga saja yang menerima bantuan dari dinas sosial Kota Kupang, kalau yang di dalam panti itu ada dibawah kewenangan Dinas Sosial Provinsi.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa perbedaan kategorisasi tempat tinggal anak menentukan jalur pelayanan yang mereka terima, meskipun kondisi kerentanan mereka secara substantif serupa. Selain itu, kehadiran Sentra Efata Naibonat sebagai institusi pusat turut memperkaya variasi jenis bantuan. Informasi mengenai bantaun dari ATENSI dari Sentra Efata Naibonat diperoleh dari wawancara dengan Ibu Marjini beliau menuturkan bahwa:

“Ada juga bantuan-bantuan itu dari Sentra Efata Naibonat di bawah kementrian sosial, itu juga mereka bantuannya banyak, dari sentra efata itu bantuannya lebih besar dari yang disediakan oleh pemerintah kota, mereka bahkan menyediakan bantuan alat-alat sekolah, makanan pokoknya untuk pemenuhan gizi dan kebutuhan sekolah itu dari sentra efata juga menyediakan itu.”

Hal ini mengindikasikan bahwa setiap lembaga menjalankan program dengan standar bantuan yang berbeda, sehingga anak dapat menerima bentuk bantuan yang tidak selalu setara tergantung pada lembaga yang menanganinya.

Fragmentasi juga tampak dalam praktik pengasuhan di tingkat keluarga, khususnya pada keluarga yang menjadi pengasuh utama bagi anak yatim. Banyak pengasuh merupakan keluarga dengan sumber daya terbatas, termasuk ibu tunggal atau nenek lanjut usia yang menjalankan pengasuhan tanpa kapasitas fisik maupun ekonomi yang memadai. Ibu berinisial IL, seorang nenek lanjut usia yang mengasuh cucunya, menyampaikan bahwa ia sering kewalahan dalam menjalankan peran tersebut. Ibu IL menuturkan:

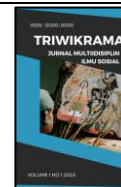
“Saya juga sangat kewalahan dalam mengurus cucu saya ini, karena belum urus urusan rumah, belum urus ini anak juga, apalagi umur saya juga sudah tidak muda lagi. Untuk bantuan Atensi ini baru dapat uang tunai, belum pernah dapat bantuan yang lainnya, mungkin karena cucu saya penerima baru.”

Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun program ATENSI telah memberikan bantuan, kapasitas keluarga pengasuh tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pengasuhan. Di sisi lain, terdapat bentuk pengasuhan kolektif seperti yang dijelaskan oleh Ibu Grace Gale, seorang ibu tunggal yang menjalankan pengasuhan bersama orang tuanya. Ia mengatakan,

“Pengasuhan anak saya juga dibantu oleh orang tua saya karena saya tinggal bersama mereka, penghasilan saya juga kurang pasti.”

Praktik pengasuhan kolektif ini menunjukkan kuatnya jaringan dukungan keluarga, namun juga menggambarkan ketergantungan yang tinggi pada sistem informal ketika pendampingan sosial dari negara belum berjalan secara intensif.

Fragmentasi pengasuhan anak yatim piatu dalam pelaksanaan Program ATENSI di Kota Kupang dapat dipahami sebagai gejala kegagalan sistem sosial dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Menggunakan kerangka teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, khususnya skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), fragmentasi tersebut tidak



semata-mata menunjukkan ketidakteraturan administratif atau lemahnya koordinasi, tetapi mencerminkan terganggunya keseimbangan struktural antar-sub-sistem yang seharusnya bekerja secara komplementer dalam menjamin perlindungan anak. Parsons menegaskan bahwa sebuah sistem sosial hanya dapat bertahan jika seluruh subsistem menjalankan peran fungsional secara terpadu dan saling mendukung (Parsons, 1951; Kurniawan, 2022).

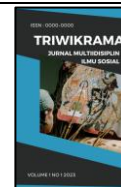
Dalam konteks Program ATENSI, kegagalan fungsi *Adaptation* (A) terlihat melalui ketidakmampuan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan kebutuhan nyata anak yatim piatu. Minimnya alokasi anggaran, ketidakteraturan pemberian bantuan, dan keterbatasan tenaga profesional menyebabkan struktur layanan tidak mampu beradaptasi dengan dinamika lapangan. Penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa kapasitas sumber daya yang tidak memadai merupakan faktor dominan yang menghambat pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia (Tobing & Sembiring, 2023). Ketika bantuan bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan, kebutuhan dasar anak tidak terjamin secara konsisten, sehingga menunjukkan lemahnya fungsi adaptasi sistem kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, kegagalan *Goal Attainment* (G) tampak dari ketidaktercapaian tujuan utama ATENSI, yaitu pemenuhan hak dasar dan peningkatan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Meskipun bantuan formal diberikan, tujuan jangka panjang seperti stabilitas psikososial, pendidikan, pendampingan intensif, serta perlindungan berkelanjutan tidak tercapai karena layanan yang diberikan tidak komprehensif. Penelitian oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa banyak program perlindungan anak di tingkat daerah hanya memenuhi tujuan administratif (penyaluran bantuan), tetapi gagal mencapai tujuan substantif kesejahteraan anak. Kondisi ini selaras dengan analisis Parsons bahwa kegagalan subsistem dalam menetapkan dan mencapai tujuan umum akan melemahkan stabilitas sistem sosial secara keseluruhan.

Fungsi *Integration* (I) merupakan titik paling kritis dari fragmentasi pengasuhan. Dalam pelaksanaan ATENSI di Kota Kupang ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, lembaga kesejahteraan sosial/panti, Kementerian Sosial, serta komunitas lokal. Tidak adanya mekanisme integrasi data, koordinasi lintas lembaga yang jelas, alur komunikasi, maupun pendampingan bersama menyebabkan layanan terpecah dalam “jalur-jalur silo”. Kondisi ini menciptakan ketimpangan perlindungan antara anak yang diasuh di panti dan anak yang diasuh secara mandiri di keluarga/kerabat. Penelitian Putri (2023) menemukan bahwa lemahnya integrasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sering menjadi penyebab utama kegagalan layanan sosial di Indonesia. Dalam perspektif Parsons, ketika fungsi integrasi melemah, sistem sosial tidak dapat mempertahankan kohesi, sehingga terjadi kegagalan struktural yang terlihat dari ketidaksinambungan layanan dan hilangnya kesinambungan pengasuhan anak.

Sementara itu, melemahnya *Latency* (L) tampak dari ketidakmampuan sistem untuk memelihara nilai, norma, dan komitmen bersama mengenai pentingnya perlindungan anak. Minimnya edukasi publik, lemahnya peran komunitas, serta tidak adanya internalisasi nilai perlindungan anak dalam praktik pengasuhan menyebabkan orientasi jangka panjang terhadap kesejahteraan anak tidak terbentuk. Penelitian Dewi (2022) menegaskan bahwa masyarakat di berbagai daerah di Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi nilai proteksi anak, sehingga pengasuhan sangat bergantung pada bantuan formal negara. Dengan demikian, kegagalan fungsi *Latency* membuat sistem tidak mampu mereproduksi nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan pengasuhan yang aman dan stabil.

Mengacu pada kerangka AGIL, fragmentasi pengasuhan anak yatim piatu bukan sekadar masalah administratif, melainkan sinyal bahwa sistem kesejahteraan sosial tidak bekerja sebagai “organisme” yang seharusnya saling menopang antar-sub-sistem. Ketika fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola tidak berjalan secara harmonis, maka



perlindungan anak tidak dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, reformasi kebijakan ATENSI perlu diarahkan pada integrasi lintas lembaga, harmonisasi kewenangan, penguatan pendampingan berbasis komunitas, serta internalisasi nilai proteksi anak di tingkat keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pengasuhan anak yatim piatu tidak lagi terfragmentasi tetapi menjadi sistem perlindungan yang terkoordinasi, adaptif, dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program desa devisa di Desa Sidomulyo merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan Pelaksanaan Program ATENSI bagi anak yatim piatu di Kota Kupang menunjukkan bahwa meskipun bantuan telah diberikan, terutama dalam bentuk dana tunai sebesar Rp750.000 per tahun, program ini belum mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga pengasuh hanya menerima bantuan uang tunai, sementara komponen lain seperti bantuan permakanan, layanan bimbingan, serta pendampingan sosial belum tersampaikan secara optimal akibat kurangnya sosialisasi dan lemahnya penyebaran informasi. Selain itu, terjadi fragmentasi layanan akibat pembagian kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, panti asuhan, dan Sentra Efata Naibonat. Perbedaan standar bantuan dan minimnya koordinasi kelembagaan menyebabkan anak yatim menerima layanan yang tidak merata. Fragmentasi juga tampak dalam praktik pengasuhan keluarga, terutama bagi pengasuh yang memiliki keterbatasan ekonomi dan fisik. Dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons (AGIL), fragmentasi ini mencerminkan terganggunya empat fungsi dasar sistem sosial: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Sistem perlindungan sosial belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan nyata anak, tidak mencapai tujuan kesejahteraan menyeluruh, gagal berintegrasi lintas lembaga, dan belum mampu memelihara nilai-nilai perlindungan anak.

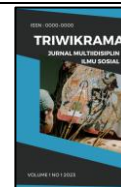
Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan Program ATENSI bagi anak yatim piatu di Kota Kupang, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut.

Pertama, pemerintah daerah dan Sentra Efata Naibonat perlu memperkuat mekanisme adaptasi (*Adaptation*) program dengan melakukan pemetaan kebutuhan anak yatim piatu secara komprehensif. Bantuan tidak seharusnya hanya berfokus pada dana tunai, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti permakanan, layanan kesehatan, pendidikan, serta pendampingan psikososial. Pemetaan ini penting agar program ATENSI mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik keluarga pengasuh yang beragam.

Kedua, untuk mencapai tujuan kesejahteraan anak secara optimal (*Goal Attainment*), diperlukan standarisasi layanan dan indikator keberhasilan program ATENSI lintas lembaga. Pemerintah kota, pemerintah provinsi, panti asuhan, dan lembaga sentra perlu memiliki acuan yang sama terkait jenis bantuan, mekanisme penyaluran, serta capaian yang diharapkan, sehingga tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Ketiga, guna mengatasi fragmentasi layanan (*Integration*), diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan melalui forum koordinasi tetap yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak. Forum ini berfungsi sebagai ruang komunikasi, penyelarasan



kebijakan, serta pertukaran data dan informasi, sehingga tumpang tindih kewenangan dan ketimpangan layanan dapat diminimalkan.

Keempat, dalam rangka menjaga keberlanjutan nilai dan fungsi perlindungan anak (*Latency*), diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan kepada keluarga pengasuh. Penguatan kapasitas pengasuh melalui bimbingan sosial, edukasi pengasuhan anak, serta dukungan psikososial menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai perlindungan dan kepentingan terbaik anak dapat terpelihara dalam praktik pengasuhan sehari-hari.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas Program ATENSI dengan pendekatan evaluatif atau studi komparatif antar daerah, sehingga dapat memberikan masukan empiris yang lebih luas bagi perbaikan sistem perlindungan sosial anak di tingkat lokal maupun nasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. P. (2022). "Internalisasi Nilai Perlindungan Anak dalam Sistem Sosial Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 55-68.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.
- Kurniawan, A. (2022). "Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dan Relevansinya dalam Analisis Kebijakan Publik di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 245-260.
- Lestari, S. (2021). "Evaluasi Program Perlindungan Anak di Indonesia: Antara Realisasi Administratif dan Pencapaian Substantif." *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 8(4), 301-312.
- Masyhari, F. (2017). *Pengasuhan anak yatim dalam prespektif pendidikan islam*. Dirasat: *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 2(2), 233-251.
- Putri, R. W. (2023). "Fragmentasi Kebijakan dan Tantangan Integrasi Layanan Sosial di Pemerintah Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(1), 22-34.
- Santoso, M. B. (2021). *Proses Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Oleh Yatim Mandiri Bogor*. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 203-210.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tobing, M., & Sembiring, J. (2023). "Analisis Kapasitas Lembaga Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Anak." *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(2), 144-157.
- Zaidan, F. A. (2024). *Analisis Kebijakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Di Sentra Wyata Guna Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 6(2).